

The background features a light gray cityscape with stylized buildings. Overlaid on this are several thick, overlapping geometric lines in shades of yellow and gold, creating a modern, architectural feel.

RENCANA KERJA PD

2025

inspektorat.babelprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini sesuai dengan *cascading* Inspektorat dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Pada akhirnya semoga Renja PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini tetap akan dapat mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, beserta seluruh aspek yang berkaitan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, ditengah akselerasi dinamika perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat cepat dan kompleks.

Pangkalpinang, Desember 2024

Plt. INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG




Drs. YUNAN HELMI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051992031009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025 melalui tahapan – tahapan:

(1) Persiapan penyusunan

- Pembentukan Tim Penyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2025;
- Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2023, dan RKPD 2024);

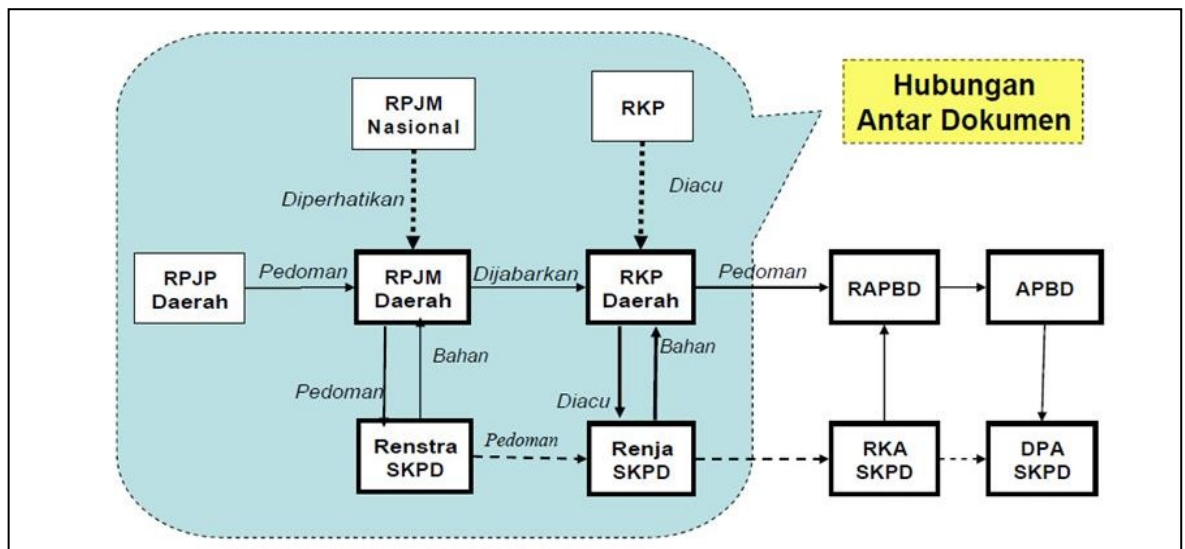
- (2) Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan para Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional PPUPD dan Fungsional Lainnya;
 - Desk dengan pengampu kegiatan.
- (3) Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2025;
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait
- (5) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim;
 - Diverifikasi oleh TAPD.
- (6) Penetapan

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2025 adalah penjabaran dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025.

GAMBAR 1.2
Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian

kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
- n. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
- o. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, adalah dokumen yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun pada tahun 2025;

1.3.2. Tujuan

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan

Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;

- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta pagu indikatif dan target indikator kinerja Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.2 Analisis Kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun 2024 dan telah direalisasikan melalui penetapan program/ kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan mengakomodir program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPD 2023-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Sasaran strategis tersebut antara lain:

Tujuan:

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Akuntabilitas Kerja Inspektorat.

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga periode Renstra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dan mendasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai target yang tertuang dalam RKPD 2024. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilihat secara umum 3 (tiga) program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut terdiri atas:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang merupakan program rutin yang dilaksanakan secara tahunan dan terdiri atas 7 (tujuh) Kegiatan;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas 2 (dua) Kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri atas 2 (dua) Kegiatan.

Untuk indikator kinerja program dan kegiatan tahun 2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi,
Indikator :
Nilai SAKIP PD dan survey kepuasan internal Inspektorat
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan,
Indikator :
 - a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - c. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,
Indikator :
 - a. Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - b. Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pencegahan dan Investigasi;
 - c. Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun transisi dari diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga dilakukan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Adapun penyesuaian nomenklatur sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN	Program Prioritas Perangkat Daerah	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4
1	Pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						20.148.580.946,00							25.084.987.100,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						20.148.580.946,00							25.084.987.100,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						20.148.580.946,00							25.084.987.100,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	16.334.658.503,00						-	19.851.152.500,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	52.744.200,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	64.745.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	27.294.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		35.295.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	25.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		29.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	12.633.327.753,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	15.750.899.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ Bulan	12.608.178.153,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		15.720.749.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	25.149.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		30.149.600,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	756.685.400,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	856.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				64 Orang	756.685.400,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		856.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	652.016.050,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	843.191.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	30.945.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		35.945.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	79.570.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		86.570.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	7.525.850,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		8.539.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	24.997.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		27.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	33.245.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		35.345.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	15.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		16.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				12 Paket	145.912.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		165.912.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	113.920.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		115.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	514.669.100,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	790.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Paket	151.169.100,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		215.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	248.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	115.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.016.466.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	930.566.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	23.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		24.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	275.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	76.316.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		80.316.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	640.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		640.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	708.750.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	615.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	145.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		245.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	63.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		70.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	500.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	3.488.922.443,00						-	4.707.834.600,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	3.338.922.443,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	4.507.834.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				64 Laporan	989.934.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		1.208.934.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				68 Laporan	1.090.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		1.490.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				68 Laporan	250.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		660.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				68 Laporan	250.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		275.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				7 Laporan	275.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		325.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				64 Dokumen	483.987.843,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		548.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	150.000.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	150.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	325.000.000,00						-	526.000.000,00	
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	325.000.000,00			-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-	-	526.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2 Perangkat Daerah	75.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia	-		176.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							20.148.580.946,00							25.084.987.100,00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dapat diketahui dari indikator- indikator berikut ini:

1. Terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kategori “B” dengan Nilai 69,53 pada tahun 2022 yang penilaiannya dilakukan tahun 2023;
2. Persentase hasil pencapaian *Monitoring Center Prevention* (MCP) KPK mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan Penganggaran APBD (100%);
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa (91,21%);
 - c. Perizinan (98,70%);
 - d. Pengawasan APIP (97,76%);
 - e. Manajemen ASN (88,78%);
 - f. Optimalisasi Pajak Daerah (99,73%);
 - g. Pengelolaan BMD (89,42%)
3. Pada tahun 2023 Rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal mengalami kenaikan karena ditambah dengan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada tahun 2023 yang berdampak pada menurunnya tingkat persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal. Rinciannya sebagai berikut:
 - a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Temuan: 331
Rekomendasi: 397
Telah selesai ditindaklanjuti: 73 (18,4%)
Dalam Proses: 18 (4,53%)
Belum ditindaklanjuti : 309 (77,83%).

b. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI:

Temuan: 575

Rekomendasi: 1423

Telah selesai ditindaklanjuti: 1165 (81,87%)

Dalam Proses: 258

Belum ditindaklanjuti: 0

4. Terkait Kebijakan Pencegahan Korupsi, LHKPN tahun 2023 dengan wajib lapor Penyelenggara Negara sebanyak 1153 dan yang telah melapor sebanyak 1153 (100%).
5. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang semula 65,21 (tahun 2022) menjadi 70,00 (tahun 2023). Tren yang meningkat ini selaras dengan Indeks Integritas Nasional Indonesia.
6. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah memenuhi karakteristik maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3.
7. Kapabilitas APIP mencapai level 3.

Realisasi Indikator Kinerja dan Perkiraan Capaian Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023 – 2026, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2022	2023 (TW 1)	2023	2024	
1	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	<3%	<2%	<2%	<2%	0,001%	-	<3%	<2%	
2	Nilai Capaian Kapabilitas APIP & Maturitas SPIP	3,00	3,01	3,02	3,03	3,00	-	3,00	3,01	
3	Nilai SAKIP PD	78	79	79	79	81,00	80,30	79	79	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selain itu Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tupoksi, maka perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

**Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Tugas: Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selain itu Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah., Fungsi: - Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; - Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; - Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur; - Penyusunan laporan hasil pengawasan; - Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan	- Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan APIP; - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi sistem manajemen data; - Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan pengawasan; - Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting.	Faktor Penghambat: - Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) serta terbitnya peraturan-peraturan baru di pusat utamanya terkait penyelenggaraan pemerintahan; - Adanya dinamika pembangunan yang cukup tinggi dan berimplikasi terhadap penyesuaian dokumen penataan ruang; - Adanya perbedaan kepentingan antar Kabupaten/Kota di Prov. Kep. Babel dan antar provinsi tetangga; - Adanya perbedaan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah; - Adanya pandemic COVID-19 yang mempengaruhi realisasi pembangunan dan penentuan prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah.; - Dokumen prosedur kerja masih dipandang sebagai dokumen, bukan pedoman dalam operasionalisasi penyelenggaraan tupoksi PD. Faktor Pendorong: - Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan; - Adanya Tim PPID yang berperan serta dalam pengembangan dan pemberian informasi ke Masyarakat terkait perencanaan dan penelitian sebagai output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.		3. Adanya kebijakan pengembangan SDM perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi; 4. Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian & pengembangan ditingkat kabupaten kota harus melalui provinsi ; 5. Adanya potensi untuk menyeimbangkan antara pembangunan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui rencana penataan ruang;
---	--	--

Evaluasi penilaian kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari :

- a. Nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan dibawah 5%;
- b. Level capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP;
- c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun TW III tahun 2024, dari 5 (lima) indikator di atas yang harus dioptimalkan adalah :

1. Akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum optimal, yaitu nilai SAKIP sebesar sebesar 80,30 yang masih dibawah realisasi tahun 2023 sebesar 81. Adapun hal – hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah:
 - a. Perlu ada *reward dan punishment* untuk staf sehingga diharapkan dapat sebagai stimulant SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
 - b. Untuk menyelesaikan satu tindak lanjut hasil pengawas eksternal yang belum selesai ditindaklanjuti.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Prov. Kep. Babel

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

3.1. Telaah Pada Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 yang mengangkat tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang di Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas;
3. Pengembangan transisi energi;
4. Percepatan Infrastruktur IKN;
5. Reformasi pengelolaan sampah, serta
6. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan.

Yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung program prioritas RPD 2023-2026 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi seluas luasnya, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang focus dan tepat sasaran.

Inspektorat sebagai Perangkat Daerah dengan mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efektif dan efisien

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tuntutan mampu bersaing dibidang pengawasan, maka Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang Pengawasan, Inspektorat secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan daerah melalui pelaksanaan, pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengawasan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

A. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 akan memfokuskan pada pelaksanaan tatanan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yaitu **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih”** dan **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel”**.

Tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan ekspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Oleh karena itu menjadi tugas penting Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan.

Sistem pemerintahan yang akuntabel berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel maka secara otomatis dapat menaikkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya Level Capaian Maturitas SPIP.

Tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan ekspektasi dan cita-citas etiap orang. Sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Oleh karena itu menjadi tugas penting Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan.

Sistem pemerintahan yang akuntabel berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel maka secara otomatis dapat menaikkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya Level Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan diatas menjadi dasar rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatnya tata Kelola penmerintahan yang akuntabel.

Rumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025
(sesuai RENSTRA 2023-2026)

Tujuan: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”				
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	2024
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%	%	< 3
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Level Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Level	3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,30

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2023, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.1 Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis Inspektorat Daerah.
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan
- Pengadaan Meubleair;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
- Sub Kegiatan:
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Reviu Laporan Kinerja;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
Sub Kegiatan:
 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
Sub Kegiatan:
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- b) Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi.
Sub Kegiatan:
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TAHUN 2025

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 Paket	7.525.850,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				8.539.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	24.997.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				27.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	33.245.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				35.345.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	15.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				16.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					12 Paket	145.912.900,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				165.912.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	113.920.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				115.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	200.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	-	-				-	514.669.100,00			-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-		-		790.000.000,00	
						Unsur Pemerintah Daerah																		
	6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Paket	151.169.100,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				215.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					24 Unit	248.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	115.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				125.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	-	-				-	1.016.466.000,00			-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-		-		930.566.000,00	
	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	23.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				24.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	275.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				185.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	76.316.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				80.316.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

											Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	640.900.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				640.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-									-	708.750.000,00				-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				615.750.000,00	
	6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
											Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						7 Unit	145.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				245.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
											Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						12 Unit	63.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				70.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																								
											Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	500.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-									-	3.488.922.443,00				-				-			4.707.834.600,00	
	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-									-	3.338.922.443,00				-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				4.507.834.600,00	
	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																								
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						64 Laporan	989.934.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				1.208.934.600,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																								
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						68 Laporan	1.090.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				1.490.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	1.01	0003	Revisi Laporan Kinerja																								
											Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja						68 Laporan	250.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				660.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	1.01	0004	Revisi Laporan Keuangan																								
											Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan						68 Laporan	250.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				275.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis																								
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						7 Laporan	275.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				325.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																								
											Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						64 Dokumen	483.987.843,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				548.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-									-	150.000.000,00				-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				200.000.000,00	
	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																								
											Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						12 Laporan	150.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-									-	325.000.000,00				-				-			526.000.000,00	
	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-									-	325.000.000,00				-		Pembangunan Sumber Daya Manusia	-				526.000.000,00	

		6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Unsur																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Unsur Pemerintahan Daerah					2 Perangkat Daerah	75.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia	-			175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
		6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
		6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					6 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
		6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					4 Perangkat Daerah	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Sumber Daya Manusia	-			176.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
							JU M L AH											20.148.580.946,00						25.084.987.100,00	

BAB - V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Penyusunan Renja Tahun 2025 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Di samping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024;
- 2) Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dan 2024;
- 3) Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

- 4) Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;
- 5) Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra Inspektorat Daerah 2023 - 2026 selama 4 (empat) tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2024

Plt. INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Drs. YUNAN HELMI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051992031009